

ABSTRAK

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, dan Temuan Audit terhadap *Audit Delay* melalui Akuntabilitas Kinerja pada Provinsi di Indonesia

Rizkiya Faizatul Aulia, 2025 (xv + 76 halaman)

Email: kikikiya43@gmail.com

Proses audit pada pemerintahan di Indonesia hanya dapat dilakukan setelah LKPD diserahkan kepada BPK. Berdasarkan IHPS 2021–2023, seluruh pemerintah daerah tepat waktu menyampaikan LKPD. Namun, rata-rata audit delay LHP LKPD provinsi justru meningkat, mengindikasikan adanya faktor lain penyebab audit delay. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah dan temuan audit terhadap audit delay dengan akuntabilitas kinerja sebagai variabel mediasi pada pemerintah provinsi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder dari laporan keuangan pemerintah daerah, laporan hasil pemeriksaan BPK, dan laporan evaluasi SAKIP oleh Kementerian PANRB pada 34 provinsi di Indonesia selama periode 2021-2023. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Hipotesis, dan Analisis Jalur (path analysis) menggunakan bantuan software SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara langsung Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja, secara langsung Temuan Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja, secara langsung Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Audit Delay, secara langsung Temuan Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Audit Delay, dan secara tidak langsung Ukuran Pemerintah Daerah dan Temuan Audit tidak berpengaruh terhadap Audit Delay melalui Akuntabilitas Kinerja sebagai Variabel Intervening.

Kata kunci: Ukuran Pemerintah Daerah, Temuan Audit, Akuntabilitas Kinerja, *Audit Delay*

ABSTRACT

The Impact of The Balanced Fund, Capital Expenditure, Leverage and The Size of The Government on The Regional Financial Independence of Provincial Government on The Island of Sumatera

Rizkiya Faizatul Aulia, 2025 (xv + 76 pages)

Email: kikikiya43@gmail.com

The audit process within the Indonesian government can only be conducted after the Local Government Financial Reports (LKPD) are submitted to the Audit Board of Indonesia (BPK). According to the Summary of Audit Results (IHPS) from 2021 to 2023, all local governments submitted their LKPDs on time. However, the average audit delay in the issuance of Audit Reports (LHP) for provincial LKPDs has increased, indicating the presence of other contributing factors. This study aims to analyze the influence of local government size and audit findings on audit delay, with performance accountability as a mediating variable, in provincial governments across Indonesia. This is a quantitative study using secondary data obtained from local government financial reports, audit reports by BPK, and SAKIP evaluation reports from Kementerian PANRB for 34 provinces during the 2021–2023 period. The data analysis techniques employed include Descriptive Statistical Analysis, Classical Assumption Testing, Multiple Linear Regression Analysis, Hypothesis Testing, and Path Analysis, with the assistance of SPSS version 26. The results show that local government size has a direct and significant positive effect on performance accountability, while audit findings have a direct and significant negative effect on performance accountability. Furthermore, local government size does not have a direct effect on audit delay, whereas audit findings have a direct and significant positive effect on audit delay. Indirectly, neither local government size nor audit findings significantly affect audit delay through performance accountability as a mediating variable.

Keyword: *Local Government Size, Audit Findings, Performance Accountability, Audit Delay*